

BENTUK KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PINUS BERBASIS NAGARI

Dian Posigi¹
San Afri Awang²

INTISARI

Pengesahan Undang Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah membuka peluang yang tidak disia-siakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk kembali menghidupkan Pemerintahan Nagari yang telah lebih kurang 26 tahun menghilang dari ranah Minangkabau digeser oleh uniformasi desa di seluruh Indonesia, sehingga sejak tahun 2000 secara resmi nagari kembali diaktifkan sebagai sebuah Pemerintahan Otonom dengan segala peraturan adat dan kekayaan alam yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan, pertama, mengetahui bentuk kegiatan masyarakat nagari dalam pengelolaan hutan pinus, kedua, untuk mengkaji ulang apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintahan nagari mengenai pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan dalam konteks hutan ulayat sebagai aset nagari yang terdapat dalam undang-undang dapat mendorong terlaksananya kemandirian masyarakat nagari.

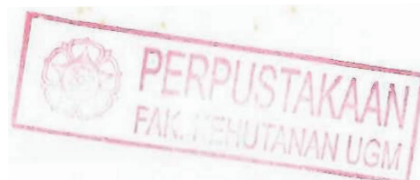
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan alat analisis adalah analisis deskriptif dan analisis kebijakan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa berlakunya kembali pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang dikatakan Pemerintahan otonom kecil di bawah Kecamatan yang memiliki otoritas dalam mengatur jalannya pemerintahan dengan setumpuk sumberdaya alam yang terdapat didalamnya, ternyata belum mampu menunjukkan diri sebagai masyarakat mandiri. Kewenangan yang diberikan ternyata belum cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata untuk mengelola kekayaan aset nagari. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam yang terjadi seiring diberlakukannya otonomi daerah lewat UU No.22 / 1999 hanya berhenti pada tingkat Kabupaten. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat tidak satupun yang dapat melindungi keberadaan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat yang dibebankan diatasnya.

Kata Kunci : Kegiatan masyarakat, Tanah ulayat, Kewenangan pemerintahan nagari, Desentralisasi, dan Kebijakan

¹Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

²Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada



SOCIETY ACTIVITY FORM IN MANAGING THE PINE FOREST BASED ON NAGARI

Dian Posigi¹
San Afri Awang²

ABSTRACT

After Act 22/1999 about Regional government being passed, province of West Sumatera caught the chance to resurrect *nagari* as an autonomous government in society level after about 26 years *nagari* has been eliminated and replaced by *desa*. So that, since years 2000, officially *nagari* was activated as the lowest administrative government of West Sumatera with all customs and natural resources it has. So called autonomous since *nagari* government was declared to have right to set up its government and manage its own natural resources which is included in *ulayat* land of the *nagari*'s people. The research aimed to find out how far the authority handed to *nagari* about managing its wealth represented in *ulayat* land could benefit the people and encourage *nagari*'s independences.

Method used in this research was case study. The tool used for analysis were descriptive and policy analysis.

Result of the research shows that the authorities handed by Pasaman government to *nagari* which want divided to 29 fields have not yet made *nagari* can be independent in managing their natural resources. *Nagari* is too dependent. The authorities are in fact not strong enough to use as tool to handle and manage *nagari* is asset. Meanwhile, decentralization of natural resources management stops on regency level, and *nagari* feel no significant changes caused by regional autonomies, on the other hand decentralization is the factor which triggered *nagari* resurrection. There is no significant policy found that regulated decentralization of the natural resources to *nagari* government. Forest on people's *ulayat* land becomes polemic since custom laws that rule its existence has to be defeated by Indonesian government law. *Ulayat* land which is owned collectively by people of one *nagari* based on trust and recorded to have nature's site as the borders traditionally has no written and legal certificates as Indonesian government acted. Consequently, in Pasaman, there is no local law about how to protect people's right on their land and any play of rule about concession on the land that would prevent people from losing their land.

Key Words : Society Activity, Ulayat land, authority, decentralization, *nagari* government, and Policy.

¹Student of Faculty of Forestry Gadjah Mada University

²Lecturer of Faculty of Forestry Gadjah Mada University

